

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG



DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Alamat : Jalan Karya Utama No. 4 Lubuk Pakam

Nomor Telepon : 7951076

Website : diskopukm.deliserdangkab.go.id

E-mail : diskopds@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan prioritas. Meskipun demikian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720819 199702 2 002**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	4
1.3 Dasar Hukum	4
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	5
BAB II.....	6
PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n.....	7
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja	16
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	17
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	17
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	19
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	21

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	22
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	28
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	29
3.2 Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV	47
PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	7
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun n	9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	10
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	11
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja	17
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	17
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	19
Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Kinerja	22
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	23
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	28
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	30
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
--------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas : Membantu Bupati Deli Serdang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

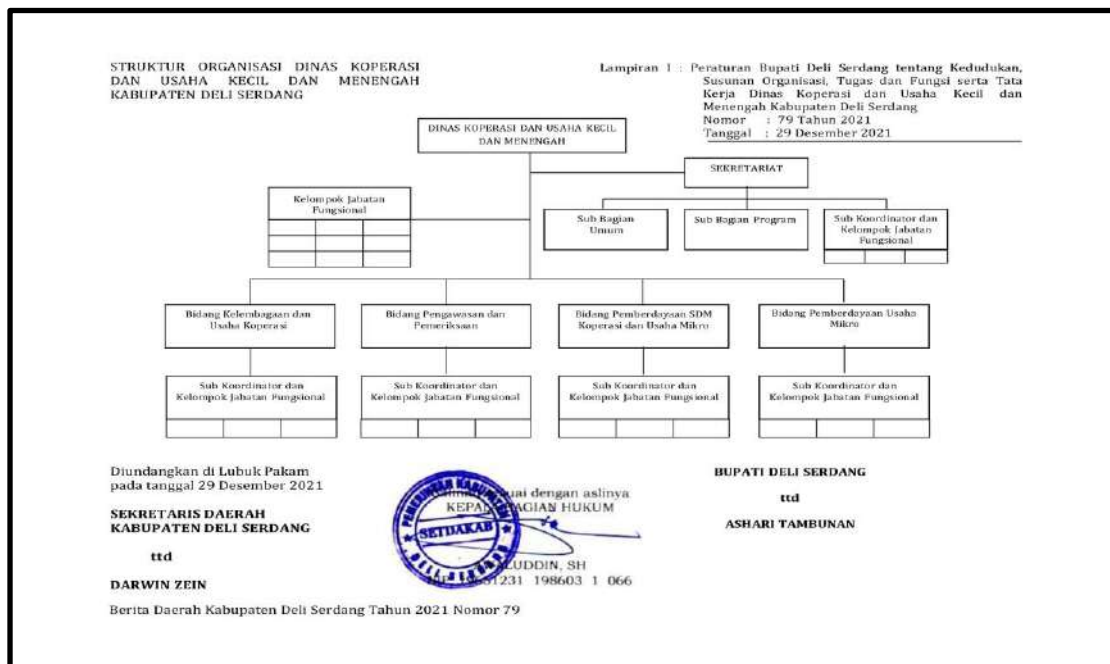
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Pembinaan teknis Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang



Sumber : Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2024	Rp10.190.569.696
APBD	Tahun 2025	Rp 9.535.184.034

Sumber : DPPA T.A 2024 dan DPPA T.A 2025

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah meningkatkan kinerja koperasi dan usaha mikro. Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
					2025	2026	2027	2028
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	67.5	70	-	-
		1.2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	85.33	85.7	-	-
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	2.1	Meningkatnya Pelayanan Prima Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	86	-	-
		2.2	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86	88	-	-

Sumber : Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 :

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	1.1 Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	Perse ntase	Usaha mikro yang berhasil meningkatkan penjualan dan/ atau modal ke kriteria di atasnya	Jumlah Usaha Mikro Binaan Naik Kelas / Total Usaha Mikro Binaan *100%	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	2.1 Persentase Koperasi Aktif	Perse ntase	Menggambarkan perbandingan kondisi koperasi aktif dengan koperasi yang terdata yang ada di Kabupaten Deli Serdang	Jumlah Koperasi Aktif / Total Koperasi *100%	Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Perangkat Daerah	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	Hasil Survei	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang
4	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	4.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	Penilaian yang dilakukan terhadap Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil Survei	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kinerja Koperasi dan Usaha Mikro	1.1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	Persentase	67.5
		1.2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	85.33
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	2.1	Meningkatnya Pelayanan Prima Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	84

		2.2	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	86
--	--	-----	--	--	-------	----

Sumber : Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang Tahun 2025

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	67.5%
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	85.33%
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Poin
4	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Nilai

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang :

Tabel 2.5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian Pegawai	30
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	42
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	8
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	833
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Layanan Kedinasan	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarpras dan Bangunan yang Terpelihara Fungsinya	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	3
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	8.22
2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	40
2.1.1	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	64.53
3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan	Jumlah Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya	30

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	5.25
4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahuan tentang perkoperasian	40
4.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	3.13
5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Koperasi yang Meningkat	50
5.1.1	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Baru	0.55
6.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang Diberdayakan	800

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
6.1.1	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100
6.1.2	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	600
6.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Naik Kelas	1.15
7.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Skala Usaha	90
7.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20
7.1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi	50
7.1.3	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	50

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2030 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	67.5	91.89	136.13	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	85.33	65.76	77.06	Tinggi	Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	91.5	108.92	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(IKM)					Daerah Kabupaten Deli Serdang
4	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86	69.39	80.68	Tinggi	Inspektorat Kabupaten Deli Serdang

Sumber : Capaian IKU Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan evaluasi terhadap indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas, realisasi sebesar 91.89% dan memperoleh nilai capaian sebesar 136.13% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mikro meningkatkan penjualan dan/ atau modal ke kriteria di atasnya dengan parameter usaha mikro tersebut sudah memiliki legalitas usaha, memanfaatkan teknologi dengan menggunakan sistem pemasaran online, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki *packaging* (kemasan) yang menjual, fokus kepada pelayanan dan adaptif. Kemudian untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif, realisasi sebesar 65.76% dan memperoleh nilai capaian sebesar 77.06% dari target. Hasil ini diperoleh dari Jumlah Koperasi Aktif dibagi Total Koperasi dikali 100%. Evaluasi ini menggambarkan perbandingan kondisi Koperasi Aktif dengan koperasi yang terdata yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Parameter ini digunakan untuk menurunkan pinjaman-pinjaman yang menjamur dimasyarakat dengan bunga yang tinggi melalui hadirnya lembaga keuangan berbentuk koperasi yang berprinsip gotong royong.

Sedangkan yang disebut dengan Koperasi Aktif yakni koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dan organisasi secara rutin, sesuai dengan tujuan dan prinsip perkoperasian. Kemudian untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi sebesar 91.5% dan memperoleh nilai capaian sebesar 108.92% dari target. Realisasi ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 yang diberikan diawal Tahun 2026 oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Kemudian untuk evaluasi terhadap indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), realisasi sebesar 69.39% dan memperoleh nilai capaian sebesar 80.68% dari target. Realisasi ini diperoleh berdasarkan penilaian SAKIP Tahun 2025 oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	63.06	62.41	52.34	67.5	91.89	136.13
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	77.5	80.90	80.95	85.33	65.76	77.06

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.87	86.04	88.5	84	91.5	108.92
4	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84.61	78.22	68.19	86	69.39	80.68

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas, realisasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Namun, berdasarkan data riil jumlah UMKM yang naik kelas mengalami peningkatan. Selanjutnya, pada tahun 2025 realisasi Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 91.89% dan memperoleh nilai capaian kategori Sangat Tinggi sebesar 136.13% dari target.

Kemudian pada indikator kinerja Persentase Koperasi Aktif, realisasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi Persentase Koperasi Aktif berada pada angka 77.5%, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 80.90% pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi 80.95% pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, realisasi Persentase Koperasi Aktif menurun menjadi

65.76%. Meskipun demikian, nilai capaian tahun 2025 termasuk kategori Tinggi sebesar 77.06% dari target.

Kemudian pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), realisasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada angka 79.87%, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 86.04%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian 88.5% dan kembali meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai 91,5% dan memperoleh nilai capaian kategori Sangat Tinggi sebesar 108.92% dari target.

Kemudian pada indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), realisasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun. Namun, tahun 2025 realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengalami peningkatan menjadi 69.39% dan memperoleh nilai capaian kategori Tinggi sebesar 80.68% dari target.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang periode 2025-2030 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	91.89	67.5	136.13
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	65.76	85.33	77.06
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91.5	84	108.92
4	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69.39	86	80.68

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas, dari 4 (empat) sasaran indikator kinerja terdapat 2 (dua) sasaran indikator kinerja mencapai tingkat kemajuan >100% dengan kategori Sangat Tinggi dan terdapat 2 (dua) sasaran indikator kinerja mencapai tingkat kemajuan <100% namun angka pada capaian termasuk kategori Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah berjalan dengan baik.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	67.5	91.89	136.13	<p>Persentase Usaha Mikro Naik Kelas berhasil mencapai target. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan penjualan dan/skala usaha pelaku UMKM. Adapun hasil ini diperoleh dari beberapa kriteria yaitu: Legalitas Usaha, Pemasaran, SDM Berkualitas, Omset hingga Pembiayaan Modal.</p> <p>Faktor Keberhasilan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan fasilitasi legalitas Usaha UMKM Deli Serdang seperti: NIB (Nomor Induk Berusaha), SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), Halal, BPOM dan HAKI. 2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan fasilitasi pemasaran produk UMKM di Deli Serdang melalui pemasaran offline di Pojok UKM Deli Serdang dan online di www.deliserdangmall.com serta promosi produk UMKM Deli Serdang ke Tribun Medan, Radio DSB Lubuk Pakam dan Pameran/ Bazar baik dalam daerah maupun luar daerah. 	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan pelatihan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan UMKM Deli Serdang baik dari Dinas Kabupaten/Kota/Provinsi/Kementerian.</p> <p>4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan akses permodalan dengan bekerjasama dengan pihak Bank. Hal ini dilakukan dengan memberikan Sosialisasi KUR kepada UMKM Deli Serdang.</p>	
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	85.33	65.76	77.06	<p>Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target dikarenakan jumlah target yang diminta meningkat dari tahun sebelumnya (tahun 2024 = 83.07% menjadi target 2025 = 85.33%). Namun, dari segi capaian mencapai angka 77.06% dengan kategori Tinggi. Selain itu, juga dikarenakan terdapat koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Beberapa diantaranya disebabkan karena kurangnya pemahaman pengurus untuk menyusun laporan keuangan koperasi.</p>	<p>Adapun solusi yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan pelatihan terhadap pengurus koperasi tentang manajemen pengelolaan perkoperasian seperti penyusunan SOP hingga Laporan Keuangan. 2. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>Surat Himbauan kepada seluruh Gerakan Koperasi untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya selambat-lambatnya 6 bulan setelah tutup buku.</p> <p>3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang memberikan Penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang berkeinginan mendirikan koperasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan koperasi baru.</p> <p>4. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang menyusun Buku Panduan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada koperasi se-Kabupaten</p>

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Deli Serdang. Buku Panduan ini diberikan kepada Gerakan Koperasi untuk dipedomani.
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	91.5	108.92	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berhasil mencapai target. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan DisKopUKM kepada masyarakat, yang mencerminkan kinerja organisasi berjalan secara efektif dan sesuai standar yang ditetapkan.</p> <p>Faktor Keberhasilan: Melakukan peningkatan disiplin aparaturnya yang berdampak pada ketepatan waktu, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta peningkatan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selain itu, perbaikan kualitas pelayanan kedinasan yang semakin responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat.</p> <p>Faktor pendukung lainnya adalah pemenuhan sarana dan prasarana urusan pemerintahan yang</p>	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						semakin memadai, sehingga mampu menunjang kelancaran proses pelayanan, meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih optimal dan berkualitas.	
4	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86	69.39	80.68	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target. Namun demikian, capaian indikator kinerja tersebut sudah cukup baik dengan capaian sebesar 80.68% dengan kategori Tinggi.	Adapun solusi yang dilakukan yaitu: Meningkatkan koordinasi dengan tim satgas AKIP yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan pendampingan pada unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Tahunan, RKA-PD, Perjanjian Kinerja, dan pelaksanaan monitoring kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang baik dan terukur sesuai

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja >100%, meskipun masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian <100% tetapi angka pada capaian termasuk kategori Tinggi dan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah berjalan dengan baik.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	67.5	91.89	136.13	422.966.996	418.075.048	98.84	
2	Persentase Koperasi Aktif	85.33	65.76	77.06	72.686.124	71.808.624	98.79	
3	Indeks Kepuasan				6.362.993.019	4.538.618.581	71.32	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Masyarakat (IKM)	84	91.5	108.92				
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86	69.39	80.68	48.343.250	45.754.000	94.64	

Sumber : Capaian IKU dan Realisasi Fisik Keuangan Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Seluruh target kinerja dapat dilaksanakan dengan baik didukung dengan pagu anggaran yang memadai. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang jarang menemukan permasalahan yang berarti.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80.68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai	86	Menunjang	
a				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tertib Pelaporan Capaian Kinerja, Rencana Kerja dan Penganggaran	100	Menunjang	
-				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	Menunjang	
-				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Menunjang	
b				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Disiplin Aparatur	100	Menunjang	
-				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian	30	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				berserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Harian Pegawai			
c				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persertase Ketersediaan Pemenuhan Layanan Umum Kedinasan	100	Menunjang	
-				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	Menunjang	
-				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10	Menunjang	
-				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42	Menunjang	
-				Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Peket Barang	8	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengandaan	Cetakan dan Pengandaan			
-				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	Menunjang	
-				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Menunjang	
-				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833	Menunjang	
d				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan prasarana Gedung Kantor	100	Menunjang	
-				Pengadaan	Jumlah	6	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Mebel	Mebeleur		ng	
e				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100	Menunjang	
-				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
-				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	Menunjang	
-				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	Menunjang	
f				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Sarpras dan Bangunan yang	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-				Pemerintahan Daerah	Terpelihara Fungsinya			
-				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Menunjang	
-				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3	Menunjang	
-				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16	Menunjang	
2	Meningkatnya Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	108.92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Poin	84		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemerintah Daerah	t (IKM)		PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
g				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Pelaporan Keuangan	100		
-				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27		
-				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administ rasi Pelaksanaa n Tugas ASN	5		
-				Koordinasi dan PenyusunanLa poran Keuangan AkhirTahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna	1		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
-				Koordinasi dan PenyusunanLa poran Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ SemesteranSK PD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD	18		
3	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	77.06	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi dan Diperiksa	8.22	Menunja ng	
a				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasa n Kekuatan, Kesehatan,	40	Menunja ng	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			
-				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	40	Menunjang	
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	64.53	Menunjang	
a				Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Dinilai	30	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Kesehatann ya			
-				Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30	Menunja ng	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASI AN	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	5.25	Menunja ng	
a				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah SDM koperasi yang meningkat pengetahua n tentang perkoperasi an	40	Menunja ng	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40	Menunjang	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang diberdayakan	3.13	Menunjang	
a				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Koperasi Yang Meningkat	50	Menunjang	
-				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan	-	-	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	n, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
-				Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	50	Menunjang	
4	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas	91.89	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Baru	0.55	Menunjang	
a				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	800	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
-				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100	Menunjang	
-				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	600	Menunjang	
-				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	Menunjang	
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Naik	1.15	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Kelas			
a				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Skala Usaha	90	Menunjang	
-				Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	20	Menunjang	
				Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi	50	Menunjang	
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	50	Menunjang	

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Uraian penjelasan tabel:

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan menunjang tercapainya target kinerja. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang jarang menemukan permasalahan yang berarti.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.315.789.094	5.408.129.868	73.92
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.343.250	45.754.000	94.64
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.362.993.019	4.538.618.581	71.32
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.500.000	18.200.000	93.33
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.844.915	342.839.474	96.34
-	Pengadaan Barang Milik Daerah	50.206.300	50.203.800	99.99

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.506.010	269.249.433	83.22
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.395.600	143.264.580	92.19
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	72.686.124	71.808.624	98.79
-	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	72.686.124	71.808.624	98.79
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	28.852.236	25.612.236	88.77
-	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.852.236	25.612.236	88.77
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN	494.723.962	491.623.962	99.37

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	LATIHAN PERKOPERASIAN			
-	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	494.723.962	491.623.962	99.37
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	182.232.848	181.437.848	99.56
-	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	296.003.844	62.631.322	21.15
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.020.932.774	1.008.541.470	98.78
-	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.020.932.774	1.008.541.470	98.78
7	PROGRAM PENGEMBANGAN	422.966.996	418.075.048	98.84

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	UMKM			
-	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	422.966.996	418.075.048	98.84

Sumber : *Realisasi Fisik Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*

Uraian penjelasan tabel:

Ada 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sepanjang Tahun 2025. Program dan kegiatan tersebut telah terealisasi dengan baik dan mencapai tingkat capaian yang memuaskan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini dilakukan sebagai upaya memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagaimana diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran disertai analisis kinerja yang mencerminkan tingkat keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang memiliki 4 (empat) sasaran strategis dengan seluruh sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tidak ada yang terlalu signifikan, namun terdapat penghambat dilingkup eksternal yaitu terbatasnya permodalan dan sarana prasarana produksi pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) sehingga menjadi penghambat dalam pengembangan usaha.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran.
2. Mengefektifkan kerja tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan.
3. Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait.
4. Penjadwalan kegiatan berdasarkan prioritas kegiatan.
5. Pembentukan tim kerja sesuai tugas dan fungsinya.
6. Melengkapi sarana dan prasarana kerja secara memadai.
7. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang kepada pihak-pihak terkait baik maupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun.

Lubuk Pakam, Januari 2026

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG**



**Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720819 199702 2 002**

Lampiran 1, Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADELA SARI LUBIS.S.Tr.Keb.,M.K.M
Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ASRI LUDIN TAMBUNAN
Jabatan : BUPATI DELI SERDANG

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuk Pakam, 2025

Pihak Kedua,

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Pihak Pertama,

ADELA SARI LUBIS.S.Tr.Keb.,M.K.M
NIP. 19711111 199303 2 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

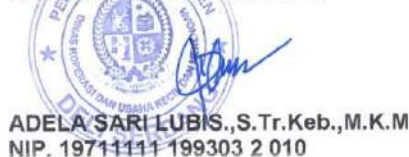
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas.	1. Persentase Usaha Mikro Binaan Naik Kelas.	67.5%
2.	Meningkatnya Koperasi Aktif.	2. Persentase Koperasi Aktif.	85.33%
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 Poin
3.	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 Nilai

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupa	Rp. 7.253.348.755	APBD dan DAU
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 72.686.124	APBD
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 25.852.236	APBD
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 494.723.962	APBD dan DAK
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 244.903.543	APBD
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.	Rp. 1.020.973.774	APBD dan DAK
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 422.695.640	APBD

Lubuk Pakam, 2025


 BUPATI DELI SERDANG
 ASRI LUDIN TAMBUNAN

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN DELI SERDANG


 ADELA SARI LUBIS., S.Tr.Keb., M.K.M
 NIP. 19711111 199303 2 010

Lampiran 2, Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025**


NO	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	TARGET
1	Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas}}{\text{Total Usaha Mikro Naik Kelas}} \times 100\%$	67.5%
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100\%$	85.33%
3	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Survey	86 Nilai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey	84 Nilai

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG



ADELA SARI LUBIS, S.Tr.Keb., M.K.M
PEMBINA
NIP. 19711111 199303 2 010

Lampiran 3, LHE SAKIP Tahun 2025

		PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG	
		INSPEKTORAT	
		Jalan Mawar Nomor 6 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514 Telepon (061) 7951646 Faksimile (061) 7951646 Pos-el: inspektoraldeliserdang@gmail.com Laman: https://inspektorat.deliserdangkab.go.id	
		Lubuk Pakam, 04 Juli 2025	
Nomor	:	700.1.2.1 / LHE. AKIP. 76. 29 / INSP / 2025	
Lampiran	:		
Perihal	:	Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025	
Kepada Yth,			
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
Kabupaten Deli Serdang			
di-			
<u>Lubuk Pakam</u>			
Tim Evaluator telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dengan berpedoman pada Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :			
1. PENDAHULUAN			
a. Dasar Hukum Evaluasi			
1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;			
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;			
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;			
4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Deli Serdang Nomor : 800.1.11.1/DD/73/2025 tanggal 08 April 2025.			
b. Latar Belakang Evaluasi			
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang cakap, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, perlu diketahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan,			
LHE SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Deli Serdang Tahun 2025		1	

serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi pelaksanaan SAKIP di setiap instansi pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan. Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

c. Tujuan Evaluasi.

Tujuan Evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).

Sasaran evaluasi AKIP adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan pada evaluasi ini adalah

1. Pengumpulan Dokumen
2. Analisa dan Penilaian
3. Pengamatan dan Wawancara

4. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Struktur Organisasi Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum;
 - b) Sub Bagian Program

- c) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kelembagaan dan usaha Koperasi, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Organisasi Perangkat Daerah.

Implementasi SAKIP organisasi perangkat daerah dievaluasi oleh tim evaluator dimana evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), IKU, Rencana Aksi serta dokumen keterkaitannya.

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bersama dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang juga memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan status sebagai berikut :

No.	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
a) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja		
1.	Menyelaraskan sasaran pada rencana aksi dengan sasaran pada Renstra Perubahan, Renja dan PK	Sudah ditindaklanjuti
2.	Menyelaraskan penetapan target pada PK dengan target pada Renstra Perubahan, Renja dan Rencana Aksi	Sudah ditindaklanjuti
b) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja		
1.	Menyelaraskan sasaran pada IKU dengan sasaran pada Renstra Perubahan	Sudah ditindaklanjuti
2.	Memanfaatkan aplikasi PAKDe dan e-SAKIP untuk pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	Sudah ditindaklanjuti
3.	Menyelaraskan sasaran pada IKU dengan sasaran pada PK	Belum ditindaklanjuti
4.	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Sudah ditindaklanjuti

No.	Rekomendasi Inspektorat	Tindak Lanjut
c)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Sudah ditindaklanjuti
2.	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Sudah ditindaklanjuti

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Evaluasi AKIP dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap komponen dan sub komponen dengan hasil sebagai berikut:

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa nilai sebesar **69,39** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu implementasi SAKIP masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,68	22,69
2	Pengukuran Kinerja	30,00	19,56	19,59
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,95	10,62
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,00	16,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			68,19	69,39
Predikat SAKIP			B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **22,69** dari nilai maksimal **30,00**.

Penilaian perencanaan kinerja meliputi 3 sub komponen perencanaan kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Perencanaan kinerja menunjukkan bahwa:

a) Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 5,50 dari nilai maksimal 6,00

Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah telah tersedia dan diformalkan antara lain :

(1) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan kinerja jangka menengah menggunakan dokumen Draft Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2029 yang telah memuat:

(a) Tujuan Renstra dan seluruh tujuan telah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan sebagai ukuran keberhasilan dan target pencapaiannya.

- (b) Sasaran Renstra dan seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran, target jangka menengah dan target tahunan.
 - (c) Program Renstra dan seluruh program telah dilengkapi dengan kegiatan, kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.
 - (d) Telah dilengkapi dengan dokumen tambahan berupa dokumen IKU.
- (2) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan kinerja jangka pendek menggunakan dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang telah memuat:
- (a) Seluruh sasaran Renja telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dan target tahunan.
 - (b) Program Renja dan seluruh program telah dilengkapi dengan kegiatan, kegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.
- (3) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan pada aktivitas yang mendukung kinerja telah melampirkan dokumen pendukung berupa Rencana Aksi, Cascading.
- (4) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan pada aktivitas yang mendukung kinerja belum melampirkan dokumen pendukung berupa Crosscutting.
- (5) Pemenuhan kriteria dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja telah melampirkan data pendukung berupa RKA.
- b) Kualitas Dokumen Perencanaan kinerja memperoleh nilai 6,87 dari nilai maksimal 9,00.**
- Dokumen draft perencanaan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah memenuhi kriteria sebagai berikut :
- (1) Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) telah di formalkan.
 - (2) Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra) telah dipublikasikan tepat waktu.
 - (3) Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) telah sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
 - (4) Ukuran keberhasilan telah sepenuhnya memenuhi unsur SMART.
 - (5) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah menantang.
- Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu :
- (1) Cascading untuk dokumen perencanaan RENSTRA 2025 – 2029 belum menggambarkan hubungan berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan.
 - (2) Dokumen Crosscutting untuk dokumen perencanaan RENSTRA 2025 – 2029 belum disusun.

c) Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 10,31 dari nilai maksimal 15,00

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum sepenuhnya memanfaatkan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan antara lain:

- (1) Rencana aksi kinerja belum dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala.
- (2) Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **19,59** dari nilai maksimal **30,00**.

Penilaian pengukuran kinerja meliputi 3 sub komponen pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja menunjukkan bahwa:

a) Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 4,80 dari nilai maksimal 6,00.

Dokumen Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- (2) Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- (3) Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b) Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 5,79 dari nilai maksimal 9,00.

Berdasarkan hasil evaluasi, pengukuran kinerja telah menjadi perhatian pimpinan namun belum mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga masih terdapat yang perlu diperhatikan yaitu :

- (1) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- (2) Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- (3) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
- (4) Setiap Bidang belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- (5) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

(6) Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c) Pemanfaatan Dokumen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 9,00 dari nilai maksimal 15,00.

Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan untuk Pengukuran kinerja sehingga terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- (1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- (4) Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum tergambar dengan jelas.
- (5) Belum seluruhnya unit (Seksi/Subbag) pada satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- (6) Belum seluruhnya pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil penilaian terhadap komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **10,62** dari nilai maksimal **15,00**.

Penilaian pelaporan kinerja meliputi 3 sub komponen pelaporan kinerja.

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja menunjukkan bahwa:

a) Pemenuhan Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai 2,70 dari nilai maksimal 3,00

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- (3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.
- (5) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
- (6) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan pada website.

b) Kualitas Dokumen Laporan Kinerja memperoleh nilai 3,10 dari nilai maksimal 4,50.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dokumen Laporan Kinerja belum menggambarkan kualitas laporan kinerja yang baik, antara lain:

- (1) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- (2) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- (3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- (4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- (5) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja serta belum dibahas secara komprehensif.

c) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 4,82 dari nilai maksimal 7,50.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah belum sepenuhnya dimanfaatkan dan memberikan dampak dalam penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya antara lain:

- (1) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai
- (2) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil penilaian terhadap komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai **16,50** dari nilai maksimal **25,00**

Penilaian evaluasi kinerja meliputi 3 sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan **Implementasi SAKIP memperoleh nilai 16,50 dari nilai maksimal 25,00.**

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagian besar sudah ditindaklanjuti namun rekomendasi tersebut bahwa hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Kabupaten Deli Serdang merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun Cascading untuk dokumen perencanaan RENSTRA 2025 – 2029 yang menggambarkan hubungan berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan.
- 2) Menyusun dokumen Crosscutting untuk dokumen perencanaan RENSTRA 2025 – 2029.
- 3) Membuat laporan monitoring rencana aksi secara berkala.
- 4) Menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada dokumen Laporan Kinerja.
- 5) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait target pada Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja, PK) terbaru kepada seluruh pegawai dan menyampaikan tugas dan target pada masing-masing bidang sehingga Dokumen Perencanaan menjadi kepedulian dan tanggung jawab seluruh pegawai.
- 6) Memanfaatkan Aplikasi PAKDe dan e-SAKIP buntut pengumpulan data kinerja serta monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- 7) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
- 8) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
- 9) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dalam mencapai kinerja.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 masuk dalam kategori Baik dengan predikat B (69,39). Meski sudah mendapat kategori baik, namun masih terdapat beberapa komponen yang harus diperbaiki

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Apresiasi dan Penghargaan atas upaya dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :



INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

H. Edwin Nasution
H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si, CGCAE.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19741221 199803 1 010

TIM PEMERIKSA :

- Gita Priscilla Pinem*
1. Gita Priscilla Pinem, SH, M.Hum
NIP. 19820312 200502 2 002
- Ahmad Rifana Pasaribu*
2. Ahmad Rifana Pasaribu, ST., M.Si
NIP. 19791028 200903 1 003
- Jummiyati*
3. Jummiyati, SE., M.Si
NIP. 19831007 201103 2 001
- Jaka Pramana*
4. Jaka Pramana, S.Kom
NIP. 19910610 201505 1 001

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Bupati Deli Serdang
2. Arsip

Lampiran 4, Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TAHUN 2025

NRR Per Unsur			
No.	Unsur Pelayanan	Actual Masyarakat	
		Indeks Konversi	Mutu
1.	Persyaratan Pelayanan	3,6549	A
2.	Prosedur Pelayanan	3,5575	A
3.	Waktu Pelayanan	3,4956	B
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,9115	A
5.	Produk Jenis Layanan	3,5752	A
6.	Kompetensi Pelaksana	3,6106	A
7.	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,708	A
8.	Sarana dan Prasarana	3,5133	B
9.	Penanganan Pengaduan, Saran	3,9204	A

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2025**

<p>NILAI IKM</p> <p style="font-size: 2em;">91,5</p>	<p style="text-align: center;">RESPONDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah : 113 - Pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> • PNS/TNI/POLRI : 2 • Pegawai Swasta : 14 • Wiraswasta/Usahawan : 46 • Pelajar/Mahasiswa : 14 - Jenis Kelamin : <ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki : 46 • Perempuan : 67 - Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> • SD : 0 • SLTP : 4 • SLTA : 41 • D1-D2-D3 : 12 • S1 : 50 • S2 : 6 - Umur : <ul style="list-style-type: none"> • 25 - : 26 • 26 - 35 : 37 • 36 - 45 : 32 • 46 - 60 : 18 • 61 + : 0 <p>PERIODE SURVEI 01-01-2025 s.d 23-12-2025</p>
--	--

A (Sangat Baik)